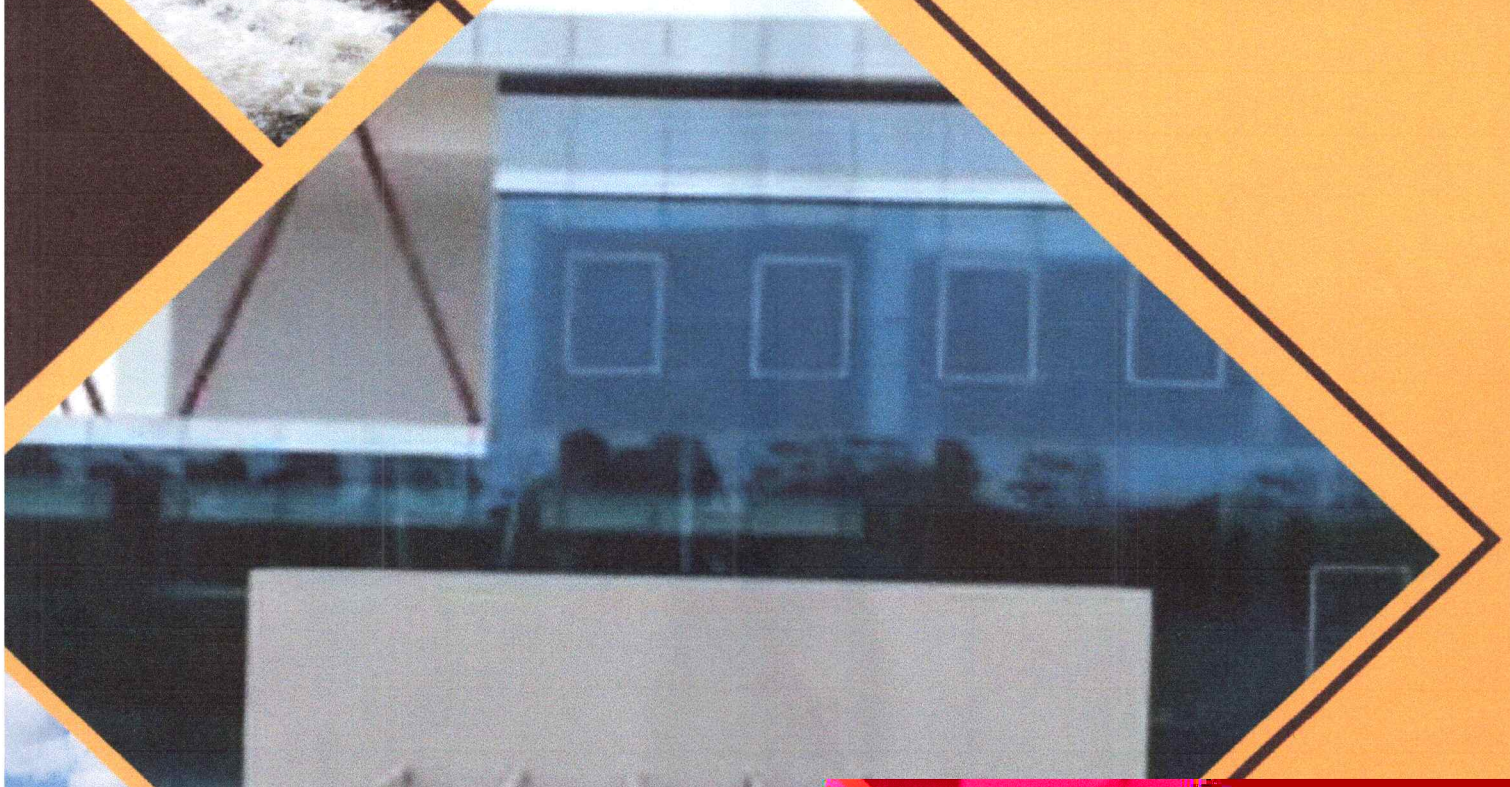
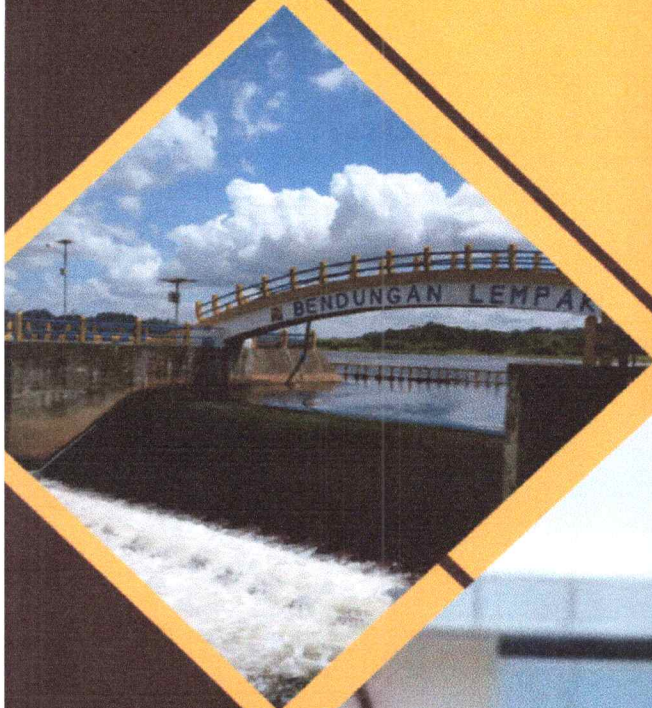


LAPORAN KINERJA (LKj)

2022

**Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

Kota Samarinda



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja yang harus disusun oleh instansi/lembaga sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun untuk menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran tugas dan fungsinya serta capaian kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat terwujud.

LKj ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kebijakan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Informasi Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi utama untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan akhirnya diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta semua pihak yang terkait.

Samarinda, 19 Januari 2023
Kepala,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda



DESY DAMAYANTI, ST., MT
NIP. 19711017200112205

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i - ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. U M U M..... 1
	B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1
	C. STRUKTUR ORGANISASI 2
	D. PERMASALAHAN 4
	E. ISU STRATEGIS..... 5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 7
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 17
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 17
	1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 17
	2. ANALISIS HAMBATAN/PERMASALAHAN..... 40
	B. REALISASI ANGGARAN 41
BAB IV	PENUTUP..... 43
LAMPIRAN	
	1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026
	2. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

“Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A” dibentuk menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016

Selanjutnya 31 Desember 2021 Peraturan Wali Kota Samarinda No. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda”, bahwa tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi dan Bidang Pertanahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai fungsi :

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat, Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- j. UPTD.

D. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	<p>Luas daerah rawan genangan</p> <p>Belum optimalnya jaringan irigasi</p> <p>Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah</p> <p>Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman</p> <p>Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai</p>	<p>Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai</p> <p>Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat</p> <p>Alih Fungsi Lahan daerah resapan air</p> <p>Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi</p> <p>Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi</p> <p>Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi</p> <p>Alih Fungsi Lahan daerah irigasi</p> <p>Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa</p> <p>Masih banyak gedung pemerintah yang rusak</p> <p>Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan</p> <p>Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase</p>
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	<p>Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan</p> <p>Belum terpenuhinya Aturan dalam Pelaksanaan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>	<p>Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan</p> <p>Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW</p> <p>Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya.</p> <p>Belum tersedianya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi</p> <p>Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR</p> <p>Belum tersedianya sistem informasi tata ruang</p>

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atasi banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan penduduk Kota Samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.

6. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menurut Keputusan Walikota Samarinda Nomor 051/327/HK-KS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama yang ditetapkan merupakan suatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi, sehingga dalam perjanjian kinerja perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dan manfaat, dibuat perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1 Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	35,13 %
		2 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	76 %
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0,98 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1 Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %
5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	1,6 %
		2 Rasio Tenaga Operator/Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	8,10 %
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	60 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2 %
8	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	1 Persentase Luas Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanah pada ijin yang terbitkan	72,72 %
		2 Persentase Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur (Luas lahan/bidang yang disediakan/target Luas Lahan yang seharusnya disediakan)	51,22 %

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

No	Program	Anggaran (Rp).
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.893.681.375
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	65.931.150.670
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.792.035.487
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.150.582.700
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.635.811.650
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	239.222.929.085
7	Program Penataan Bangunan Gedung	114.128.185.876
8	Program Penyelenggaraan Jalan	377.766.969.895
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.124.539.000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.469.245.000
11	Program Pengelolaan Izin Lokasi	37.530.000
12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	33.068.000
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	38.319.190.000
14	Program Pengelolaan Tanah Kosong	21.491.000
15	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	126.300.840
	J u m l a h	892.652.710.578

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Suber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	35,13%	
		2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	76 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2 Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
			1 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1000 M	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
			1400 M	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			500 M	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2 Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
			7 Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
			7000 M	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			6200 M	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
			2200 M	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan	78 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SPAM	Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			375 M	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			500 SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0,98 %	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2 Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			120 Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Skala Permukiman
			149 Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			100 Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
				(UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)
			1 Unit	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
			5 Bangunan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
			1 Buah	Penyediaan Sarana Persampahan
5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	1,6 %	
		2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	8,10 %	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			12 Dokumen	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
			33 Bangunan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
			59 Dokumen	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
			59 Dokumen	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
			25 Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dan Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	60 %	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			2 dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			500 M2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
			27641 M	Pembangunan Jalan
			1900 M	Rekonstruksi Jalan
			66433 M	Rehabilitasi Jalan
			24 M	Pembangunan Jembatan
			200 M	Pembangunan Terowongan/ Tunnel
			120,5 M	Rehabilitasi Jembatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			100 M	Pemeliharaan Rutin Jembatan
			2889 M	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
			4 Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			4 Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			2 Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			2 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
			1 Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			40 Orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dokumen	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
			1 Dokumen	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			1 Dokumen	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			80 Orang	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			9 SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			3 Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			10 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
			1 Kecamatan	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
				Penerbitan Izin Membuka Tanah
			70 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
			56 Surat	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian Kinerja.

Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	35,13	35,13	100
		2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	76	76	100
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78	88,17	113,03
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0,98	1,11	113,26
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	25	100

5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	1,6	4,04	252,5
		2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	8,10	8,10	100
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	60	86,64	144,40
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	100
8	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	1. Persentase Luas Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanah pada ijin yang terbitkan	72,72	15	20,63
		2. Persentase Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur (Luas lahan/ bidang yang disediakan/ target Luas Lahan yang seharusnya disediakan)	51,22	0,15	0,29

Indikator kinerja tersebut dapat tercapai melalui program/kegiatan/Sub Kegiatan :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	81,50 - B	81,50 - B	81,50 - B

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78	78	78
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	135 orang	135 orang	135 orang
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	156 Orang	156 Orang	156 Orang
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	70 SPPD	70 SPPD
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 laporan	1 laporan	1 laporan
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	145 unit	146 Unit	146 Unit
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawab banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35.13%	35.13%	35.13%
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76.00%	76.00%	76.00%
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	700 M	700 M	700 M
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 Unit	2 Unit	0 Unit (alasan: tender gagal karena penyedia tdk memenuhi kompetensi jadi akan diadakan tender ulang Januari 2023)
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi polder/kolam retensi	-	1 Unit	2 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/ direhabilitasi	13%	13%	13%
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	1000 M	278 M (alasan: karena dana yang tersedia tidak bisamemenuhi target, target awal terlalu tinggi)
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	1400 M	3790 M
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	500 M	500 M	500 M
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78%	25%	88,73 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.	500 SR	500 SR	500 SR
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	-	375 M	500 M
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	1 KM pipa	500 SR	500 SR
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	25%
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Bangunan	1 Bangunan	5 Bangunan
1	3	4	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Bangunan	5 Bangunan	5 Bangunan
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Sampah	1 Buah	1 Buah	1 Buah
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0.98	0.98	0.98
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	130 Rumah Tangga	130 Rumah Tangga	236 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pasangan Sambungan Rumah	-	120 Rumah Tangga	90 Rumah Tangga (alasan: lokasi kegiatan yang ditetapkan dana DAK tidak bisa dilaksanakan)
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan	30 Unit	149 Rumah Tangga	146 Rumah Tangga (alasan: menyesuaikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
									kondisi di lapangan dan penyesuaian harga tangki septik pasca kenaikan BBM)
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga	100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank
					(UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)				
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangunan		1 Unit	1 Unit
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	50%	50%	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi	3000 M	7000 M	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	7000 M	12.687 M
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	6200 M	17.196 M

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	2000 M	2200 M	10.000 M
	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1.60%	1.60%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice IMB/SLF/TABG	500 Advice	500 Advice	34 Advice (alasan: pada masa IMB masih menggunakan syarat teknis, sedangkan PBG sudah menggunakan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
									standar teknis, jadi banyak permohonan yang belum bisa memenuhi standar teknis, awal 2022 masih transisi antara IMB dan PBG)
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan	1 Bangunan	33 Bangunan	33 Bangunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan	4 Bangunan	25 Bangunan	25 Bangunan
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60.00%	60.00%	86,64%
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	3100 M	3100 M	89.613,85
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	500 M2	0 (alasan: Pelaksanaan pembebasan baru selesai hingga tahap DPPT dan baru dilaksanakan pembebasannya ditahun 2023)
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	300 M	27641 M	36.190,83 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	300 M	1900 M	2.027 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rehabilitasi	1000 M	66433 M	53.423,02 M (alasan: dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang memerlukan item kegiatan tambahan sebagai penunjang dikegiatan tersebut sehingga mengurangi panjang efektif jalan yang dapat diperbaiki)
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 M	24 M	602,03 M
1	3	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	100 M	200 M	0 (alasan: Pelaksanaan kegiatan pembangunan terowongan baru akan dimulai di tahun 2023)
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 M	120,5 M	337,41 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
									panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 M	100 M	100 M
1	3	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1000 M	2889 M	5.852, 44 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10%	6,4%	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	350 Orang	350 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	350 org	40 org	60 Orang
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	
1	3	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
1	3	11	2.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dolumen
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	80 org	80 org	85 Orang
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.2	0.2	0.2
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0.2%	0.2%	0.2%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen Alasan: kegiatan yang dikerjakan hanya ada 1)
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	0.2 Nilai	0.2 Nilai	0.2 Nilai

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen (alasan: dokumen yang dihasilkan hanya ada 2)
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.1 Nilai	0.1 Nilai	0.1 Nilai
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentasi Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	45,35 %	45,35 %	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	1 SK
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	1 SK (alasan: Realisasi tidak tercapai karena Perwali terbit di bulan Desember 2022)
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani/Mediasi	5 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5 laporan	3 laporan	0 Kasus
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasum	51,22 %	51,22 %	00,15%
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah	120 Ha	120 Ha	18.040 M2 (alasan: warga tidak bisa melengkapi administrasi untuk pembayaran ganti rugi)
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	4 Laporan	10 Laporan	3 Laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	13%	13%	3%
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	1.500.407 M2	1.500.407 M2	305.955 M2 (alasan: karena
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Laporan
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	72,72 %	72,72 %	72,72 %
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	56 Surat	15 Surat (alasan: karena 1. Pelaksanaan IMTN yang semula di Dinas Pertanahan beralihke DPUPR melalui DPMPSTP) 2. Pelaksanaan IMTN baru mulai dilaksanakan kembali bulan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022
1					2	3	4	5	6
									Juni 2022 dengan peraturan Wali kota yang baru (No. 14/2022 ttg IMTN) 3. Dari dua poin di atas cukup menghambat pelaksanaan IMTN di dinas karena perlu waktu sosialisasi terlebih dahulu baik kepada masyarakat maupun kepada petugas pelaksana
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	70 Laporan	70 Laporan	56 Laporan
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	56 Surat	15 Surat

2. Analisis Hambatan/Permasalahan

Selain hambatan/permasalahan dalam kolom 6 tabel di atas, terhadap capaian kinerja masih terdapat hambatan/permasalahan lainnya yaitu :

1. Ada beberapa perbaikan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Proses P-APBD yang waktunya terbatas/kurang guna menyelesaikan administrasi dan fisik kegiatan.
3. Faktor sosial/pembebasan lahan belum diselesaikan terlebih dahulu.

Beberapa hambatan/permasalahan tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan percepatan pelaksanaan disamping itu juga melalui sosialisasi kegiatan.

Sedangkan solusi penyelesaian kinerja terhadap hambatan/permasalahan adalah :

1. Perbaikan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat diukur Program/kegiatannya.
2. P-APBD diutamakan pada pekerjaan Non Fisik atau pekerjaan mendesak/darurat.
3. Penyelesaian masalah sosial sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
4. Lebih Terarahnya dan fokus pada program/kegiatan yang prioritas untuk mendukung Indikator Kinerja Utama.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan tercapainya indikator kinerja telah didukung anggaran sebesar Rp. 892.652.710.578,00 dengan realisasi Rp. 763.490.452.948,00 sisa anggaran Rp. 129.162.257.630,00 secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

Laporan Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.893.681.375,00	26.552.260.620,00	91,90
2	Program Pengelolaan SDA	65.931.150.670,00	15.602.949.150,00	23,67
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.792.035.487,00	7.330.226.375,00	94,07
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.150.582.700,00	10.904.635.200,00	97,79
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.635.811.650,00	4.282.064.810,00	92,37
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	239.222.929.085,00	236.070.684.990,00	98,68
7	Program Penataan Bangunan Gedung	114.128.185.876,00	109.215.023.423,00	95,70
8	Program Penyelenggaraan Jalan	377.766.969.895,00	331.627.104.856,00	87,79
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.124.539.000,00	811.404.250,00	72,15
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.469.245.000,00	3.273.233.950,00	94,35
11	Program Pengelolaan Izin Lokasi	37.530.000,00	11.545.450,00	30,76
12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	33.068.000,00	20.687.800,00	62,56
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	38.319.190.000,00	17.658.302.954,00	46,08
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	21.491.000,00	16.029.900,00	74,59
14	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	126.300.840,00	114.299.220,00	90,50
	T o t a l	892.652.710.578,00	763.490.452.948,00	85,53

Sumber :SIPD dan FMIS

Uraian analisis anggaran	Jumlah
Pagu anggaran yang tersedia	: Rp. 892.652.710.578,00
Realisasi	: Rp. 763.490.452.948,00
Sisa anggaran	: Rp. 129.162.257.630,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. LKj disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan/sasaran dan indikator Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2022 umumnya menggambarkan realisasi kinerja yang telah dicapai terdiri dari 15 (lima belas) Program, 26 (dua puluh Enam) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan baru sumber dana APBD kota, Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan Dana Alokasi Khusus, 8 (delapan) Sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Bahwa alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 892.652.710.578,00, Realisasi Anggaran Rp. 763.490.452.948,00, Sisa Anggaran Rp. 129.162.257.630,00, kegiatan dan program telah berhasil mencapai sasaran dengan pencapaian persentase kegiatan fisik 92,65 % dan keuangan 85.53 %

Namun demikian, masih terdapat kelemahan terutama dalam sistem pengukuran kinerja. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai yang mampu mendukung “*Data Base Management System*” dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj).
2. Belum adanya standar kinerja yang valid dan akurat antara tujuan/sasaran kinerja sehingga seringkali indikator kinerja utama yang ditetapkan, antara satuan pengukuran kinerja *outcome* masih banyak menggunakan % (*persentase*) dan bersifat “*Uncontrollable*”./tidak terukur
3. Belum adanya “*Benchmark*” (pembanding dari instansi sejenis) yang dapat dijadikan : “*Best Value Measurement*” dalam pengukuran kinerja.

Disamping perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa indikator kinerja utama tertentu baik pada level sasaran maupun level kegiatan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem sasaran strategis itu sendiri. Perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai “*Data Base Management System*” sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
2. Merancang dan membangun standar kinerja maupun “*Benchmark*” yang dapat dijadikan sebagai “*Best Value Measurement*” sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat dibandingkan dengan baik dan memadai (*eligible*).

Akhirnya besar harapan kami Laporan KinerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021 ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-

perbaikan diberbagai sasaran dan kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran strategis dan indakator kerja utama dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKj ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan upaya dan pengelolaan pengembangan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	RPJMD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan petihara (ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tertindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tertindungi di dalam sebuah kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut dikali 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD <i>dibagi</i> Jumlah rumah di kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
4	Meningkatnya sampah pengelolaan melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun <i>dibagi</i> Jumlah total rencana persampahan yang dibangun <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <i>dibagi</i> Jumlah IMB yang berlaku <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <i>dibagi</i> Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Bina Konstruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <i>dibagi</i> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <i>dibagi</i> 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi dikali 100%	Bidang Pertanahan	
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	Bidang Pertanahan	
		Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	%	RPJMD	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan dikali 100%	Bidang Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan dikali 100%	Bidang Pertanahan	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tertindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51	51,79	52,07	52,37	52,37

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Samarinda, 2 Januari 2022

Kepala,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T
NIP. 19660330 199303 1 006

PENETAPAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	81.5	Nilai		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,252,591,627.00
			78	Nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00
			2	Laporan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,308,550,254.00
			2	Laporan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	40,000,000.00
			4	Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,596,085,400.00
			1	Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740,468,225.00
			1	Laporan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,467,487,748.00
2	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40	%		
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	299,306,306,271.00
			3000	Meter	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	299,306,306,271.00
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	%		
					Program Pengelolaan SDA	105,300,000,000
			800	Meter	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,750,000,000.00
			14	%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,550,000,000.00
3	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	78,14	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	44,662,893,685
			500	SR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	44,662,893,685
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9,762,000,000
			100	Rumah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,197,000,000
			100	Septic Tank	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT)	2,565,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	%		
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	23,825,000,000
			1	Bangunan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	23,825,000,000
6	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73	%		
					Program Penataan Bangunan Gedung	275,009,808,650
			500	Advice	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	275,009,808,650
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	200,000,000
		1	Kecamatan	Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah kabupaten/Kota	200,000,000	
7	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10	%		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,300,000,000
			500	Orang	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	600,000,000
			6	Dokumen	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000
		2	Kegiatan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	400,000,000	
8	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65	%		
					Program Penyelenggaraan Jalan	402,860,008,761
		3,200	Meter	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	402,860,008,761	
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	%		
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4,325,000,000
			0,2	%	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2,090,000,000
			2	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	885,000,000
			0,2	Nilai	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	490,000,000
		0,2	Nilai	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	860,000,000	
10	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	%		
					Program Pengelolaan Izin Lokasi	50,000,000
			9	SK	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
					Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	175,000,000
		58	Surat	Penerbitan Izin Membuka Tanah	175,000,000	
11	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	%		
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	30,000,000
			1,600,407	M2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	30,000,000
			100	%		
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	27,400,000,000
		214	ha	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27,400,000,000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%		
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45,000,000
			5	Kasus	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000

